

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN CV. ADENIS
RENT CAR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH :

HENDRA WARDITIA PUTRA
NIM: 10727000151

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2012**

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban, beban tanggung jawab (resiko), serta bentuk penyelesaian sengketa antara penyewa dan pemberi sewa mobil menjadi kajian penulis didalam penelitian ini. Pengalihan resiko atau resiko ditanggung secara bersama diantara penyewa dan pemberi sewa didalam pelaksanaan perjanjian sewa mobil pada dasarnya disebabkan oleh kelalaian penyewa sehingga penyewa dapat dinyatakan tidak memenuhi prestasi yang diatur didalam perjanjian sewa menyewa.

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat Masalah Pokok, Pertama mengenai ketentuan Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa Pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru. Kedua, penyelesaian sengketa terhadap Wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car, dengan menggunakan dua data, Yaitu Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan Masalah yang diteliti, dan Data Sekunder yang diperoleh dari Kepustakaan, berupa Literatur Hukum, Karya Ilmiah, dan Sebagainya.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian sewa Mobil, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima Fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima jaminan dari penyewa, dan menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, dengan kewajiban antara lain menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa dan memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa. Pihak penyewa mempunyai hak menerima mobil yang disewakan dan menerima jaminan layak pakai terhadap Mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian sewa yang dibuat, dengan kewajiban memberikan Fotocopy KTP/SIM/KK dan jaminan kepada pemberi sewa, menggunakan Mobil sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian, dan membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car yaitu penyewa dibebankan biaya ganti rugi atas atas kerusakan mobil yang disewa dengan nominal di bawah Rp.1.000.000 dalam hal ini Pertanggungjawaban para pihak didasarkan atas perjanjian timbal balik, yaitu resiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV. ADENIS RENT CAR	
A. Profil CV. Adenis Rent Car.....	13
B. Perjanjian sewa menyewa pada CV. Adenis Rent Car...	17
 BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian tentang wanprestasi.....	24
B. Sebab-sebab wanprestasi.....	26
C. Wujud wanprestasi dalam perikatan.....	27
D. Alternatif Dispute Resolution	28
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car...	38
B. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa Mobil Pada CV. Adenis Rent Car.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi, perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi guna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah sistem pada transportasi darat.

Transportasi darat merupakan salah satu Alat Transportasi yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru, yaitu salah satu kota yang berkembang pesat di dalam penggunaan sarana transportasi darat. Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan Roda Empat (Mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu keberadaan Mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan sarana transportasi.

Keberadaan Mobil di Kota Pekanbaru sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi Masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sebagai sarana menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan Jasa alat Transportasi Mobil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan usaha rental mobil di Kota Pekanbaru tumbuh dan berkembang disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat

yang menghendaki sarana transportasi darat sebagai sarana dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk keperluan keluarga, kantor, ataupun keperluan Bisnis.

Kebutuhan akan Mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja seperti sebagai kendaraan menuju tempat rekreasi atau mudik pada hari-hari besar keagamaan, karena berdasarkan pengamatan di lapangan, pihak perusahaan juga memanfaatkan kehadiran jasa rental mobil dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari dengan tujuan antara lain berupa melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa maupun adanya syarat dan ketentuan pemakaian mobil tahun tinggi sebagai mobil operasional sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa rental mobil telah membawa keuntungan tersendiri bagi pengusaha karena biaya operasional berupa pembelian mobil dapat dihindarkan dengan melakukan perjanjian sewa dengan pemberi sewa. Oleh karena itu pihak pemberi sewa harus menyerahkan mobil yang disewa dalam keadaan baik dan layak jalan, salah satu pemberi sewa mobil di Kota Pekanbaru adalah CV. Adenis Rent Car.

CV. Adenis Rent Car beralamat di Jalan Garuda, Gg. Murni Nomor 12 Labuh Baru Timur Pekanbaru merupakan salah satu badan usaha berbentuk perorangan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa alat transportasi yang beroperasi di Kota Pekanbaru, yaitu menyewakan dan merentalkan mobil kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyewa dapat menggunakan mobil yang disewakan dengan cara mengunjungi tempat pemberi sewa untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa, pihak CV. Adenis Rent Car meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang disewa. Hal ini didasarkan atas

kesepakatan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.

Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu bentuk perjanjian oleh pemberi sewa dicatat dan dibukukan oleh pihak CV. Adenis Rent Car dengan tujuan agar mudah menemui atau menghubungi pihak penyewa apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian atau wanprestasi. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa serah terima mobil antara penyewa dan pemberi sewa terjadi setelah adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa.

Persetujuan atau perjanjian sewa menyewa sangat penting, yaitu si pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.¹

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsesuil atau adanya kesepakatan, tetapi oleh undang-undang diadakan perbedaan antara perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa-menyewa secara lisan:

1. Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu untuk itu.
2. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung, PT Bale, 1986) h. 45

sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.²

Asas konsensualitas dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat Syarat, Yaitu:³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat Nomor 1 atau kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat nomor 2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum⁴ atau orangnya, sedangkan syarat nomor 3 atau suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 suatu sebab yang halal disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.⁵

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.⁶ Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dihindarkan terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh satu pihak.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001) h. 385

³ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta, Liberty, 1985) h. 21

⁴ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya paramita, 2000) h. 223

⁵ Ibid., h. 224

⁶ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru, UIR Pres, 2008) h. 139

Prestasi berasal dari bahasa Belanda; *prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan.⁷

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi itu antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya.⁸

Wanprestasi oleh penyewa pada CV. Adenis Rent Car dapat terjadi berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, seperti tidak memberitahukan kepada pihak CV. Adenis Rent Car 2 jam sebelum masa sewa berakhir dengan maksud untuk memperpanjang masa sewa sebagaimana diatur di dalam perjanjian.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikan kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati, dan;
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, seperti memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam perjanjian.⁹

Wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007) h. 371

⁸ Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, (Pekanbaru, UIR Press, 2005) h. 112

⁹ Wawancara dengan Ade Irma Pemilik CV . Adenis Rent Car Tanggal 02 November 2011

disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Adenis Rent Car secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil (objek penelitian) dimana pihak penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, faktor-faktor penyebab wanprestasi dari penyewa, serta mengenai penyelesaian wanprestasi pada CV. Adenis Rent Car, dengan judul penelitian ;” **Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, dan mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan cepat, maka penulis membatasi permasalahan ini pada Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa Mobil dengan CV. Adenis Rent Car di Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk:

1. Menambah ilmu pengetahuan penulis terutama dalam ilmu hukum dan khususnya dalam hukum perjanjian sewa menyewa.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi CV. Adenis Rent Car terhadap perjanjian Sewa menyewa tersebut.

3. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data sampai dengan penarikan kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini memakai penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukum dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya dibandingkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli dalam bentuk literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui Tanya jawab langsung maupun penyebaran kuesioner.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berkas perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa di CV. Adenis Rent Car, Serta data yang diperoleh dari buku-

buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Kota Pekanbaru, tepatnya pada CV. Adentis Rent Car yang beralamat di jalan Garuda, Gg. Murni Nomor 12 Pekanbaru.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰ Populasi yang menjadi penelitian adalah pihak pemberi sewa dan penyewa yang melakukan wanprestasi pada tahun 2011 dengan total populasi sebanyak 6 orang, terdiri dari:

1. Pemberi sewa : 1 orang
2. Penyewa yang wanprestasi pada tahun 2011 : 5 orang

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹¹ Adapun sampel dari penelitian ini adalah 1 orang pemberi sewa dan 5 orang penyewa yang wanprestasi pada tahun 2011. Identitas pemberi sewa adalah Ade Irma Y.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press), h. 118

¹¹ *Ibid.*, h. 119

- b. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.¹² Kuesioner dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden, yaitu penyewa mobil yang wanprestasi pada CV. Adenis Rent Car pada tahun 2011.
- c. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak pemberi sewa.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun Cara Penulis mengambil Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara;

- a. Deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan Skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk Penelitian ini. Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum yang berisi tentang Profil CV. Adenis Rent Car

BAB III : Tinjauan Tentang Wanprestasi.

¹² Yan Pramadya Puspa, 1977 *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu) h.170

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru.

BAB V : Terdiri dari Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TERHADAP SEWA MENYEWA MOBIL PADA CV. ADENIS RENT CAR

A. PROFIL CV. ADENIS RENT CAR

Berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 2 Juni 2005, CV. Adenis Rent Car berdiri pada Hari Kamis, Tanggal 2 Juni Tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris ADRIANTO di Pekanbaru, dengan pemilik bernama ADE IRMA YANUM yang bertempat tinggal di Jalan Garuda Gang Buntu no. 79A, RT 02, RW 09 Kelurahan Labuh Baru Timur. Kecamatan Payung Sekaki.

CV adalah singkatan dari bahasa belanda *Commanditaire vennootschap* yang berarti perseroan komanditer. Cara-cara pendiriannya diatur didalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu: Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si melepas uang.¹

Maksud dan tujuan perseroan ini berdasarkan akta pendiriannya adalah sebagai berikut

1. Melakukan usaha dalam bidang penyewaan kendaraan bermotor.

¹ Sudarsono, *Op. Cit.*, h.80

2. Melakukan perdagangan umum termasuk juga perdagangan interinsulair, impor dan ekspor baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grossier, distributor dan keagenan /perwakilan dari badan-badan usaha lain.
3. Melakukan usaha dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan, gedung-gedung, jembatan,-jembatan, jalan-jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, air, mesin-mesin, pipa-pipa, pengeboran tiang pancang, telepon, serta instalasi dari fasilitas gedung lainnya.
4. Menjalankan usaha dalam bidang Real Estate yang antara lain menyelenggarakan pendirian gedung-gedung baru, pembangunan perumahan dan kawasan industri, rehabilitasi gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada, menguasai dan melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung dan hak atas tanah.
5. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang, serta pertamanan.
6. Menjalankan usaha dalam bidang eksploitasi hutan yang meliputi logging, sawmill, chipmill, pulmill, wood working dan lain-lain industri perkayuan, penebangannya, pengumpulan serta pengelolaannya dan hasil-hasil hutan lainnya.
7. Melakukan usaha dalam bidang industri pada umumnya antara lain melakukan usaha dalam bidang industri bahan bangunan, pakaian jadi, sepatu, perkayuan, furniture, mainan kayu dan kerajinan tangan.
8. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.
9. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (Maintenance) untuk segala kendaraan bermotor.

10. Menjalankan usaha percetakan, berdagang alat-alat serta mesin-mesin percetakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan perjidilan.
11. Melakukan usaha dalam bidang jasa promosi, antara lain iklan, reklame dan /atau pelayanan (Service) yang berkenaan serta di butuhkan untuk pelaksanaan sesuatu usaha dan usaha-usaha lain baik secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas.
12. Menjalankan usaha dalam bidang Cleaning Servis.
13. Menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa dan/atau pelayanan (Service), terutama jasa warung telekomunikasi, kios phone, jasa perbengkelan, dan jasa konsultan di bidang manajemen, kecuali dalam bidang jasa perpajakan dan hukum.

Berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 2 Juni 2005, CV. Adenis Rent Car di urus dan dipimpin oleh pesero Ade Irma Yanum dengan jabatan direktur. Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis. Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki pesero komanditer terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh pesero pengurus. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para

pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

B. Perjanjian Sewa Menyewa pada CV. Adenis Rent Car

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car diketahui bahwa bentuk pelayanan penyewaan mobil dapat dilakukan untuk hitungan jam/hari/minggu/bulan, atau tahun.²

Berdasarkan Pasal 1548 KUH perdata, yang dimaksud sewa-menyewa ialah:

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.³

Dari definisi di atas, terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

1. Perjanjian dua belah pihak.
2. Ada pihak menerima kenikmatan suatu barang.
3. Selama suatu waktu tertentu.
4. Pembayaran suatu harga.

Berdasarkan Pasal 1549 KUH Perdata, dijelaskan bahwa semua jenis barang, baik tidak bergerak, baik bergerak yang disewakan. Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, disebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis.

Ketentuan mengenai barang tak bergerak dan bergerak diatur pada Buku ke II Bab Kesatu KUH Perdata tentang Kebendaan dan Cara Membedakannya, dengan rincian sebagai berikut :

² Surat perjanjian Penyewaan kendaraan Bermotor CV. Adenis Rent Car, Pasal 1

³ Pasal 1548 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Pasal 506 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak ialah :

1. Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya.
2. Penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang diatur oleh Pasal 510.
3. Pohon-pohon dan tanaman lading, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah-buah pohon yang belum dipetik, demikian pun barang-barang tambang seperti; batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
4. Kayu tebang dari kehutan-hutanan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong.
5. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

Berdasarkan Pasal 507 KUH Perdata, karena peruntukannya, termasuklah dalam pengertian tak bergerak, yaitu :

1. Dalam perusahaan pabrik: barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggembungan, besi-besi dan barang-barang tak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kualik-kualik pengkukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, pun sekiranya barang-barang itu tak tertancap atau terpaku;
2. Dalam perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya, sekedar barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran ruangan, pun sekiranya barang-barang itu tak terpaku;

3. Dalam kemilikan tanah: lungkang atau timbunan gemuk diperuntukkan guna merabuk tanah; burung merpati termasuk dalam kawan, sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik; ikan yang ada dalam kolam;
4. Bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung; jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si pemilik telah dihubungkan dengan kebendaan tak bergeraknya guna dipakai selamanya; Si pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tak bergeraknya, bilamana benda-benda itu dilekatkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tak bergerak tadi, dimana benda-benda itu dilekatkannya.

Pasal 508 KUH Perdata menambahkan benda-benda yang juga merupakan kebendaan tak bergerak, yaitu dalam bentuk hak-hak, sebagai berikut:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai alas kebendaan tak bergerak;
2. Hak pengabdian tanah;
3. Hak numpang karang;
4. Hak usaha;
5. Bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang;
6. Bunga sepersepuluh;
7. Pajak pekan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya;
8. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tak bergerak.

Dari ketentuan benda tidak bergerak di atas, dapat disimpulkan bahwa benda tak bergerak dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Barang yang bersifat tak bergerak, yang terdiri dari tanah, segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara tumbuh di situ, yaitu secara berakar atau bercabang, seperti tanam-tanaman, buah-buahan yang belum di petik, dan segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara didirikan disitu dengan mempergunakan tanah atau paku;
2. Barang yang ditujukan supaya menjadi satu, oleh karena dipakai terus-menerus, dengan barang-barang tak bergerak, seperti dari suatu pabrik segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan lain-lain, yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik, dari suatu rumah tempat tinggal, segala kaca, lukisan, dan lain-lain yang alat-alatnya untuk menggantungkan barang-barang itu, merupakan bagian dari dinding, dari suatu perkebunan, segala sesuatu yang dipergunakan selaku rabuk bagi tanah, dan burung-burung merpati yang secara besar-besaran dikumpulkan di tanah itu, sarang-sarang selama belum dipetik, serta ikan-ikan tambak, barang-barang runtuh dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu;
3. Beberapa hak-hak atas barang-barang yang tak bergerak yang tersebut di atas, seperti: hak memetik hasil atau memakai, hak pemilikan pekarangan terhadap pekarangan tetangga, hak postal atau hak mempunyai bangunan di atas milik orang lain, hak menguasai tanah seperti pemilik sendiri dengan membayar sejumlah uang, hak atas hasil tanah dalam wujud buah-buahan atau uang, dan hak menuntut di depan hakim supaya barang-barang tak bergerak diserahkan kepada penggugat.⁴

Berdasarkan Pasal 509, 510, dan 511 KUH Perdata, ada dua golongan barang-barang bergerak, yaitu:

⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta, PT Intermasa, 1986) h. 14-

1. Barang-barang yang bersifat bergerak dalam arti, barang-barang itu dapat dipindahkan tempat.
2. Beberapa hak atas barang bergerak seperti: hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seorang, hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu Negara, baik Negara sendiri maupun Negara asing.⁵

Para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa dalam bentuk barang bergerak (Mobil) pada CV. Adenis Rent Car adalah pihak penyewa dengan pimpinan CV. Adenis Rent Car.

Pada Pasal 1 perjanjian dijelaskan pemakaian mobil 1 (satu) hari sama dengan 16 jam kecuali pemakaian mobil lebih dari 1 (satu) hari dihitung 24 jam. Pada Pasal 2 ditentukan mengenai jangka waktu sewa menyewa mobil dengan ketentuan:

1. Bahwa kendaraan yang disewa dikembalikan tepat pada waktunya.
2. Apabila pihak kedua memakai mobil melebihi waktu pemakaian yang dijanjikan maka pihak kedua dikenakan denda 10%.
3. Apabila pihak kedua memakai mobil melebihi dari 4 jam dari yang dijanjikan maka pihak pertama akan menghitung pemakaian sama dengan 1 (satu) hari.

Pada Pasal 3 disebutkan

1. Apabila terjadi kecelakaan dan kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh pihak kedua, maka pihak kedua harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan tersebut.
2. Apabila dalam masa penyewaan pihak kedua menyalah gunakan kendaraan yaitu melanggar hukum, maka pihak kedua harus bertanggung jawab sepenuhnya ;dan

⁵ *Ibid.*, h. 16

3. Pihak pertama selaku yang menyewakan mobil dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun.

Pada Pasal 4 mengatur lanjutan masalah yang ada di dalam pasal sebelumnya. Apabila terjadi pada Pasal ke 3 maka pihak kedua tetap berkewajiban membayar sewa kendaraan selama perawatan di bengkel, urusan terhadap polisi, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyewaan kendaraan sampai kendaraan yang disewa kembali oleh pihak pertama.

Pada Pasal 5 perjanjian diterangkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perjalanan sewa menyewa kendaraan bermotor ini akan disepakati oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.¹

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut

¹Kartini Muljadi &Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*,(Jakarta, Rajawali Pers, 2010) h. 91

memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.²

Dalam Bahasa Belanda istilah wanprestasi adalah “wanprestatie” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Tidak terpenuhinya suatu kewajiban itu dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu:

- a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaannya maupun karena kelalaian.
- b) Karena keadaan memaksa (force majeure), hal ini terjadi diluar kemampuan debitur.

Pengertian wanprestasi ini sendiri belum mendapatkan keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberapa istilah yaitu : ingkar janji, cidera janji, melanggar janji dan lain sebagainya.

Dalam membicarakan “wanprestasi”, tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai”. Adapun pengertian umum mengenai wanprestasi ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.

B. Sebab-Sebab Wanprestasi

² *Ibid.*, h. 92

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang diketemukan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat supaya ada tata tertib didalamnya dan supaya akhirnya masyarakat pada umumnya menemukan keadaan selamat dan berbahagia. Keadaan selamat dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya. Akan tetapi orang manusia tetap orang manusia yang seberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedang memenuhi suatu janji pada hakekatnya mementingkan diri orang lain, terhadap siapa janji itu diucapkan. Maka sudah selayaknya hidup masyarakat sehari-hari penuh dengan hal-hal tidak menepati janji. Dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji.

Kata wanprestasi ini berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi. wanprestasi dapat berwujud tiga macam yaitu:³

1. pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji.
2. Pihak berwajib telambat dalam melaksanakannya.
3. Pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan atau tidak sebaik-baiknya.

C. Wujud Wanprestasi dalam Perikatan

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT. Bale, 1981) h. 44

Dalam suatu perikatan yang dibuat dua pihak yang terikat yaitu debitur dan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Adapun wujud atau bentuk wanprestasi itu adalah sebagai berikut :

- a) Debitur tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi;
- b) Debitur terlambat memenuhi prestasi/perikatan;
- c) Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau debitur keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.”

Dari ketiga bentuk wanprestasi tersebut diatas, maka yang menjadi masalah adalah pada saat mana debitur dikatakan terlambat memenuhi prestasi dan pada saat mana pula debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila debitur tidak memenuhi perikatan atau melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hal ini kreditur dapat meminta ganti rugi atau ongkos kerugian dan bunga yang dideritanya. Hal ini menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata bahwa oleh kreditur dapat dituntut :

- a. Kerugian yang diderita kreditur;
- b. Keuntungan yang seharusnya akan diterima.

D. Alternatif Dispute Resolution / Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah satu

negara berpenduduk paling padat di dunia. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat.⁴

Para ahli Non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.⁵

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah.⁶

Dalam konteks kehadiran masyarakat yang mau untuk patuh pada hukum ataupun yang telah patuh hukum dalam suatu negara kesatuan tersebut, maka semangat yang muncul dewasa ini adalah juga semangat pengenyampingan untuk tidak mempergunakan proses penegakan hukum via litigasi tersebut. Namun bedanya adalah, dalam konteks ini, pengenyampingan dilakukan guna mencapai suatu situasi “menang-menang” (*win-win*) antara pihak-pihak terkait, yang diperkirakan juga akan lebih menyembuhkan (*healing*) terkait para pihak yang terlibat (khususnya korban), serta lebih resolutif (sebagai suatu kata bentukan “re-solusi” yang dapat diartikan sebagai “tercapainya kembali solusi yang sebelumnya tidak lagi diperoleh”). Minimal, pengakhiran konflik atau sengketa bisa dilakukan tanpa ada pihak yang kehilangan muka atau *elegant solution*. Alternatif terkait pengenyampingan tersebut adalah,

⁴ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2002, h. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2000, h. 11

bahwa diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam kondisi, alasan dan atau perbuatan tertentu, bisa dilakukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolutions* (selanjutnya disebut dengan ADR).⁷

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan lainnya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru sehingga dapat berjalan, jika penyelesaian sengketa tidak berjalan dalamarti sebenarnya.⁸

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu kepentingan (*interest*), hak-hak (*rights*), dan status kekuasaan (*power*). Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaan nya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut diatas.⁹

Latar belakang munculnya dan perkembangan ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa), adalah :¹⁰

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;

⁷ *Ibid.*

⁸ Suyud Margono, *ADR(Alternative Dispute Resolution and Arbitration) Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2000, h. 17.

⁹ *Ibid.* h. 18.

¹⁰ *Ibid.*

2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar serta memperluas akses keadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Dasar pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, disebutkan bahwa:¹¹

“Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan ADR ini, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif diluar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien. Dilain pihak hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang mungkin timbul.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, pengertian arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang metode penyelesaiannya melalui antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase telah diperkenalkan sebagai suatu lembaga yang dipilih para pihak yang mengikat, apabila timbul sengketa. Dengan demikian alternatif penyelesaian sengketa oleh undang-undang bertindak sebagai lembaga independen di luar arbitrase.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, h 19.

¹³ *Ibid*, h. 20.

Arbitrase oleh undang-undang mempunyai ketentuan, cara dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya. Kedua-duanya terdapat kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu :¹⁴

1. Sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan;
2. Sesuai peraturan perundang-undangan sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya “damai” (perdamaian).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, karena tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan pendapat mengikat (*binding opinion*), mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya :¹⁵

1. Mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas.
2. Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam: ¹⁶

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi, pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Pustaka Kartini, Jakarta : 1991), h. 18.

¹⁵ *Ibid*, h. 19.

¹⁶ *Ibid*. h. 23.

menyatakan sifat keterkaitan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh klien.

2. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering disebut dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah” sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut Negosiator. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif, disini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.

Pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya dilakukan secara formal, tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pertemuan secara langsung, pada saat negosiasi dilakukan negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak yang berselisih atau bersengketa dapat melakukan suatu proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (win-win) dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.

3. Mediasi

Mediasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *mediation* adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama

melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Dengan kata lain mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

4. Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan dengan mediasi. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.

5. Pemberian Pendapat Hukum

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari ADR, pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

6. Arbitrase

Menurut undang-undang No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat (1)). Pada dasarnya arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh pihak ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang ahli di bidangnya secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Pada CV.

Adenis Rent Car

Sebelum diuraikan Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa pada CV. Adenis Rent Car, Penulis memaparkan terlebih dahulu data penyewa yang menyewa mobil. Menurut pimpinan CV. Adenis Rent Car, penyewa kebanyakan dari golongan pribadi, sementara dari golongan perusahaan tidak begitu banyak karena perusahaan pada umumnya telah memiliki mobil operasional sendiri atau telah mengadakan kontrak dengan perusahaan sewa menyewa mobil yang besar.¹

Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata, yang dimaksud sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Perbedaan antara mobil yang disewa oleh pribadi dan perusahaan menurut pimpinan CV. Adenis Rent Car adalah:

1. Pada golongan pribadi biasanya sebagai pengemudi adalah penyewa itu sendiri, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan, ada kalanya pengemudi dimintakan dari pemberi sewa.
2. Meskipun tidak terlalu kontras, tetapi dalam hal pembayaran, apabila mobil disewa oleh perusahaan, maka adanya kepastian terhadap pembayaran sewa, sedangkan dari penyewa pribadi pembayaran terkadang sulit dalam pembayarannya.

¹ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012
Pada Pukul 16.42 Wib

3. Perjanjian sewa dengan peminjam dari golongan pribadi biasanya dilakukan survei terlebih dahulu oleh pemilik sewa dalam hal penyewa merupakan pelanggan baru, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan hal tersebut sangat jarang dilakukan.
4. Pada golongan pribadi, biasanya mobil tidak dipinjam langsung oleh pihak penyewa tetapi oleh kenalan pemberi sewa atau kenalan pihak penyewa (makelar/perantara sewa) dengan kompensasi berupa *fee*, sedangkan bagi perusahaan, biasanya penyewa diwakilkan kepada kuasa perusahaan.
5. Meski tidak ada dasar secara tertulis, tetapi biasanya harga sewa dengan peminjam dari golongan pribadi dibedakan antara pelanggan lama dan pelanggan baru, sedangkan harga sewa dari golongan perusahaan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.²

Latar belakang Peminjam Mobil (Penyewa) Pada CV. Adenis Rent Car menurut Responden pada umumnya dipinjam oleh golongan pribadi, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pimpinan CV. Adenis Rent Car, bahwa para Penyewa Mobil di CV. Adenis Rent Car adalah Pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai Badan Hukum.

Badan hukum adalah Organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan Akta Autentik dan oleh hukum diperlakukannya sebagai personal atau sebagai Orang, badan Hukum memiliki hak dan kewajiban dapat dituntut dan atau dapat menuntut dimuka pengadilan dan dapat juga memiliki kekayaan, aktifitasnya bergerak dibidang perdagangan, industri, sosial dan lain-lain bidang sesuai dengan isi (sebagian) dari akta pendiriannya.³

² Hasil wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 16.47 Wib

³ Yan Pramadya Puspa, *kamus hukum*, Aneka ilmu, Jakarta. 2008, h. 97

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga oleh pihak lainnya.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Adenis Rent Car, diketahui bahwa alasan penyewa meminjam Mobil adalah untuk keperluan pribadi/keluarga dan untuk keperluan kerja/bisnis.⁵ Alasan tersebut dibenarkan oleh penyewa pada CV. Adenis Rent Car.

Dari 3 (tiga) orang responden (60%) menyatakan bahwa alasan melakukan sewa mobil pada CV. Adenis Rent Car adalah untuk keperluan keluarga, sedangkan 2 (dua) orang responden menjawab keperluan Bisnis sebagai alasan melakukan sewa mobil pada CV. Adenis Rent Car.

Alasan meminjam mobil dengan dasar keperluan keluarga, seperti liburan hari-hari besar keagamaan lebih besar dari pada untuk keperluan Bisnis, atau dengan kata lain sewa dilakukan kebanyakan untuk keperluan konsumtif (hanya menggunakan) dari pada keperluan produktif (yang menghasilkan).

Menurut Penulis, Alasan penyewa meminjam Mobil pada umumnya didasarkan beberapa hal, seperti tidak repot, adanya service mobil dari pemberi sewa, kendaraan pribadi tidak mencukupi kapasitas, dan sebagai pengganti kendaraan pribadi telah dimiliki.

Berdasarkan Pasal 1550 KUH Perdata, pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk;

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; dan

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h.39

⁵ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 16.52 Wib

3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa.

CV. Adenis Rent Car dapat dikatakan sebagai salah satu pelaku usaha, pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengandung pengertian, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati, maupun Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang, keduanya itu membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Pimpinan CV. Adenis Rent Car menyatakan bahwa bentuk perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Adenis Rent Car yang menjadi dasar hubungan antara penyewa dengan pemberi sewa adalah dalam bentuk lisan dan tulisan.⁶ Berdasarkan data dari responden, bentuk perjanjian yang dilakukan adalah secara tertulis.

Dari 5 orang Responden (100%) menyatakan bahwa bentuk Perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa pada CV. Adenis Rent Car adalah dalam bentuk Tertulis. Secara Normatif bentuk perjanjian tertulis memberikan kepastian terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian.

⁶ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 16.57 Wib

Menurut Penulis, Perjanjian dalam bentuk lisan antara penyewa dan pemberi sewa tidak memberikan perlindungan Hukum bagi pemberi sewa.

Berdasarkan data dari responden, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Keluarga (KK) hanya diwajibkan kepada pelanggan baru, sementara bagi pelanggan lama tidak diberikan lagi karena identitas penyewa telah ada pada CV. Adenis Rent Car pada berkas yang lama.

Dari 5 orang responden, 2 orang responden (40%) dari total populasi responden menjawab bahwa penyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car harus meninggalkan identitas diri dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, sedangkan 3 orang responden (60%) dari total populasi responden menjawab bahwa penyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car tidak harus meninggalkan Identitas.

Berdasarkan Pasal 1552 KUH Perdata, Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa terhadap semua cacat barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi.

Penyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car harus meninggalkan Fotocopy KTP dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Adenis Rent Car. Salinan KTP tersebut merupakan tanda bukti sebagai penyewa (dari golongan pribadi) apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, selain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), biasanya penyewa juga dimintakan untuk melampirkan fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Keluarga (KK). Fotocopy identitas telah kuat apabila terjadi wanprestasi oleh penyewa.⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012, pada Pukul 17.03 Wib

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting dari proses perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan perjanjian sewa didalam penelitian ini pada CV. Adenis Rent Car dibuat untuk waktu tertentu, yaitu sewa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka penyewa dibebankan memberikan jaminan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan (Fisik) tertentu. Berdasarkan pada Pasal 1554 KUH Perdata, pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa:

”Setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang di antara mereka”.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang.

Menurut Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Jaminan kepada penyewa dari golongan pribadi adalah surat-surat berharga, seperti Fotocopy Surat Izin Usaha atau sebagainya apabila menggunakan Mobil untuk lebih dari 1 hari, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan tidak dimintakan jaminan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa pada CV. Adenis Rent Car harus meninggalkan jaminan.

Jaminan dibedakan menjadi 2 macam, Yaitu:

1. Jaminan materiil (jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. Jaminan imateriil (jaminan perorangan), yaitu jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁸

Penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa pada CV. Adenis Rent Car tidak harus meninggalkan jaminan kepada pemberi sewa. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian sewa, yaitu antara penyewa dan pemberi sewa telah saling mengenal sehingga dalam hubungan tersebut adanya saling percaya antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Adanya sistem saling percaya tersebut secara tidak langsung berimbas kepada sistem pembayaran sewa pada CV. Adenis Rent Car, dengan ketentuan apabila pemakaian mobil untuk 1 (satu) atau 2 (dua) hari lamanya, uang sewa tidak dibayar dimuka, tetapi dibayarkan setelah mobil selesai digunakan, dan apabila pemakaian mobil untuk lebih dari 2 (dua) hari lamanya, uang sewa dibayarkan sebesar 50% dari besaran harga sewa. Dalam hal mobil digunakan selama 1 (satu) minggu, maka penyewa dikenakan biaya sewa dimuka sebesar Satu Juta Rupiah (Rp. 1.000.000,-).⁹

Uang sewa yang dibayarkan 100% kepada pemberi sewa setelah mobil digunakan oleh penyewa merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh CV. Adenis Rent Car kepada penyewa.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 23-24

⁹ Hasil Wawancara dengan Pimpinan, CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 17.18 Wib

Adapun hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan hasil penelitian pada CV. Adenis Rent Car antara lain sebagai berikut:

1. Hak

Pihak yang menyewakan mempunyai hak:

- a. Menerima Fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa.
- b. Menerima jaminan dari penyewa.
- c. Menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Penyewa mempunyai hak:

- a. Menerima mobil yang disewakan.
- b. Menerima jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

2. Kewajiban

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban:

- a. Menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa.
- b. Memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Bagi penyewa, yaitu:

- a. Memberikan fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa.
- b. Memberikan jaminan kepada pemberi sewa.
- c. Menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian; dan
- d. Membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.

Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan;

2. Hak untuk memperoleh informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; dan
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.¹⁰

Perlindungan hukum bagi konsumen (penyewa mobil) adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.¹¹

Adanya penyewa yang menyewa barang (mobil) tentunya mendatangkan harapan tersendiri bagi pemberi sewa. Pada saat persaingan bisnis meningkat, mau tidak mau pelaku usaha rental mobil harus mengenyampingkan segala hal administrasi yang sebenarnya mengurangi syarat-syarat sewa, sehingga pelaku tidak memperhatikan lagi ketentuan mengenai resiko bisnis yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem rental dengan melakukan survei kerumah penyewa harus ditingkatkan demi kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil.

Menurut Penulis, Resiko dalam menjalankan bisnis rental mobil merupakan suatu sudut pandang tersendiri yang harus dipahami oleh pemberi sewa, sedangkan penyewa yang meminjam mobil harus memahami juga resiko yang harus ditanggungnya, yaitu hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sewa menyewa. Tanggapan responden terhadap

¹⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 40

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung, Nusa Media, 2010) h.23

tanggungjawab menanggung resiko apabila terjadi kerusakan mobil pada saat berlakunya waktu sewa, diketahui mayoritas responden (100%) memberikan jawaban bahwa apabila terjadi kerusakan pada mobil pada saat berlakunya waktu sewa maka yang bertanggung jawab (menanggung resiko) tersebut adalah kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pemberi sewa. Salah seorang responden mengungkapkan bahwa kerusakan mobil pada saat berlakunya waktu sewa ditanggung oleh kedua belah pihak apabila kerusakan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00-.

Berdasarkan Alasan Responden tersebut, Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban atas kerusakan mobil pada saat waktu sewa berjalan merupakan tanggung jawab penyewa, dengan ketentuan apabila kerusakan diatas Rp. 2.000.000,00, Maka biaya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pemberi sewa.

Menurut Subekti, resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.¹²

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya.

Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya resiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.¹³

Menurut pimpinan CV. Adenis Rent Car, biaya kerusakan terhadap mobil biasanya ditaksir oleh tim penilai yang dibentuk oleh pemberi sewa, bila kerusakan dalam tingkatan

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT.Intermasa, 2001) h.144

¹³ *Ibid.*, h.144-145

ringan, seperti adanya goresan pada mobil, maka pemilik sewa tidak akan memintakan pertanggungjawaban kepada penyewa, tetapi apabila kerusakan diatas Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,00-), maka tanggung jawab atas kerusakan kendaraan ditanggung secara bersama-sama oleh penyewa dan pemberi sewa. Kerusakan mobil yang terjadi pada saat mobil digunakan pada pemberi sewa berakibat pemberi sewa bertanggung jawab untuk memberikan mobil pengganti kepada penyewa, harga sewa tidak berubah meskipun mobil pengganti memiliki merek/jenis, tahun, dan kondisi fisik lebih bagus daripada mobil yang telah disewa sebelumnya.¹⁴

Menurut Penulis, kerusakan mobil pada saat waktu sewa berlangsung tentunya sangat merugikan kedua belah pihak, bagi penyewa akan menderita kerugian berupa tujuan dari penyewaan mobil tidak tercapai, sedangkan bagi pemberi sewa adalah kerugian dari segi materi, yaitu biaya kerusakan mobil. Kerusakan mobil dapat dibagi atas dua jenis, yaitu kerusakan ringan, dan berat. Dalam kerusakan berat, dapat diartikan mobil mengalami kecelakaan.

Pimpinan CV. Adenis Rent Car mengakui bahwa penyewa pernah meninggalkan mobil sewa (tidak bertanggung jawab) ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat masih berlakunya sewa.¹⁵

Pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewakan melanggar hukum berdasarkan wawancara dengan pimpinan CV. Adenis Rent Car adakah seharusnya ditanggung oleh penyewa dengan mekanisme, pengurusan terhadap mobil di kantor polisi diurus oleh pemberi sewa, dari pengurusan tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada penyewa/keluarga penyewa.¹⁶ Menurut responden, pihak yang bertanggung jawab

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 17.32 Wib

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 17.45 Wib

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 11 Januari 2012 pada Pukul 17.49 Wib

ketika mobil yang disewanya melanggar hukum adalah penyewa itu sendiri, CV. Adenis Rent Car tidak dimintakan pertanggungjawaban apabila mobil yang disewakan melanggar hukum, atau dengan kata lain pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewa melanggar hukum adalah pihak penyewa itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1139 BW, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa itu termasuk salah satu piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif.¹⁷

Perbedaan antara Hak-Hak Absolut dan Hak-Hak Relatif, yaitu:

1. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relatif hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Dengan adanya hak relatif, pihak ketiga harus menghormati hubungan hukum yang ada.
2. Hak-hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolut ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Sedangkan hak relatif menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sisi balik hak relatif adalah kewajiban orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009) h.185

3. Objek hak-hak absolut pada umumnya benda, sedangkan objek hak relatif adalah prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan suatu, atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi pada masa sekarang, yang dikategorikan sebagai benda bukan hanya barang berwujud, melainkan barang tidak berwujud, seperti hak kekayaan intelektual.¹⁸

B. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car

Salah satu bentuk wanprestasi oleh penyewa yang diduga memiliki itikad baik, adalah penyewa menyewa mobil untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dengan membayar uang sewa dimuka, tetapi mobil yang disewa baru dikembalikan setelah 7 (tujuh) hari digunakan oleh penyewa dan sisa uang sewa untuk 5 (lima) hari yang belum dibayar susah untuk ditagih.¹⁹

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰ Di dalam penelitian ini berarti kelalaian oleh pihak debitur (penyewa) dalam pelaksanaan sewa menyewa dengan pihak kreditur (pihak yang menyewakan).

Tindakan wanprestasi dari pihak penyewa pada hakikatnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, tetapi hal tersebut telah menjadi resiko tersendiri bagi pelaku usaha. Berdasarkan salah seorang yang pernah bekerja pada salah satu rental mobil di Kota Pekanbaru, diungkapkan bahwa, demi alasan *service* terhadap konsumen, sangat jarang pemberi sewa memintakan jaminan kepada penyewa terhadap mobil yang disewakan.²¹

¹⁸ *Ibid.*, h. 200-201

¹⁹ Wawancara dengan Salah Seorang Penyewa Mobil di Kota Pekanbaru, pada Tanggal 23 Januari 2012 pada Pukul 13.16 Wib

²⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta 2008), h.98

²¹ Wawancara dengan Salah Seorang Penyewa Mobil di Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 23 Januari 2012 pada Pukul 13.20 Wib

Beberapa contoh wanprestasi yang tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada penyewa berdasarkan pendapat pribadi penulis adalah mobil yang disewa menabrak orang dan orang yang ditabrak tersebut meninggal dunia, atau membawa narkoba didalam mobil.

Dari dua contoh di atas, mobil yang disewa akan dijadikan barang bukti di Kantor Polisi. Berdasarkan perjanjian, maka penyewa berkewajiban membayar segala biaya yang dibutuhkan yang ditimbulkan atas perkara tersebut, tetapi pada kenyataanya pihak pemberi sewa yang menanggung segala biaya yang berhubungan dengan kerusakan dan biaya administrasi mobil di Kantor Polisi. Dapat disimpulkan bahwa meskipun didalam perjanjian telah ditentukan beban pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu pada barang yang disewakan, tetapi karena satu hal dan lain hal, sesuatu yang diperjanjikan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Menurut penulis, bagi perusahaan rental mobil besar, tindakan wanprestasi dari beberapa penyewa mungkin saja tidak berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan, tetapi bagi perusahaan kecil, yang umumnya hanya memiliki 40% dari total mobil yang disewakan tentunya menuntut pemberi sewa untuk lebih selektif dalam memberikan sewa. Hal ini membawa dampak perusahaan kecil tidak dapat bertahan lama dalam bisnis rental mobil, terlebih lagi apabila mobil yang disewakan masih dalam status kredit dan persaingan usaha yang menuntut pelaku usaha seolah-olah tidak diperbolehkan berlama-lama memutuskan menyewakan atau menolak sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal tidak mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan menurut pimpinan CV. Adenis Rent Car adalah:

1. Bila keterlambatan selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam, maka penyewa tidak dikenakan denda, dengan ketentuan penyewa telah menghubungi CV. Adenis Rent Car

bahwasanya mobil telah selesai digunakan tetapi masih berada di cucian, sudah memasuki Kota Pekanbaru, dan sebagainya.

2. Bila keterlambatan selama 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) jam atau setengah hari, maka penyewa dibebankan biaya sewa untuk waktu sewa selama 1 (satu) hari.²²

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang wanprestasi dalam hal mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut pimpinan CV. Adenis Rent Car adalah kendaraan/mobil dimasukkan ke bengkel atas inisiatif pemberi sewa, penyewa dimintakan pertanggungjawaban berupa pembayaran uang sewa selama mobil berada di bengkel, karena biaya kerusakan mobil telah ditanggung terlebih dahulu oleh pihak asuransi, atau dengan cara biaya pengurusan ditanggung terlebih dahulu oleh pemberi sewa, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara pemberi sewa dan penyewa, sehingga dapat saja dimungkinkan biaya pengurusan ditanggung bersama antara penyewa dan pemberi sewa.²³

Bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang wanprestasi dalam hal mobil dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian menurut pimpinan CV. Adenis Rent Car berdasarkan contoh yang pernah terjadi adalah mobil sewa digunakan untuk tindakan kriminal sehingga penyewa tidak mau bertanggung jawab atas biaya pengurusan mobil sebagai barang bukti di Kantor Polisi. Biaya yang dikeluarkan oleh pemberi sewa sebesar Rp. 15 juta tidak diganti oleh penyewa karena penyewa telah menjalani proses pidana, pemberi sewa terpaksa membayar biaya pengurusan dikarenakan apabila mobil tidak digunakan maka mobil yang seharusnya berproduksi menjadi pasif. Tetapi tidak menutup kemungkinan

²²Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 12 Januari 2012 pada Pukul 10.17 Wib

²³ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 12 Januari 2012 pada Pukul 10.27 Wib

perkara antara penyewa dan pemberi sewa dilanjutkan setelah penyewa yang melakukan tindakan kriminal selesai menjalani hukumannya.²⁴

Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyewa dan pemberi sewa pada CV. Adenis Rent Car adalah secara kekeluargaan atau non litigasi, tidak ada responden memberi tanggapan melalui mekanisme pengadilan atau litigasi.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa karena tindakan wanprestasi dari penyewa oleh pemberi sewa dapat diselesaikan dengan musyawarah, damai, mufakat, atau diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Penyelesaian wanprestasi oleh pemberi sewa biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan cara pemberi sewa menghubungi penyewa, baik dengan mendatangi langsung atau melalui komunikasi telepon. Komunikasi yang dilakukan didasarkan atas identitas penyewa dalam bentuk Fotocopy KTP/SIM penyewa atau bagi penyewa yang tidak meninggalkan Fotocopy dalam arti sudah saling kenal dengan pemberi sewa, maka sewa mendatangi langsung alamat penyewa.

Pihak CV. Adenis Rent Car tidak/belum pernah menuntut penyewa yang wanprestasi ke pengadilan dengan alasan pada umumnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara pemberi sewa dengan penyewa/keluarga dari penyewa, dalam hal ini rata-rata sistem sewa yang digunakan adalah sistem kekeluargaan atau di luar pengadilan.²⁵

²⁴ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 12 Januari 2012 pada Pukul 10.40 Wib

²⁵ Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Adenis Rent Car, Ibu Ade, pada Tanggal 12 Januari 2012 Pada Pukul 10.40 Wib

Di dalam buku beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa, Yahya Harahap sebagaimana dikutip Ahmadi Miru menyebutkan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan bagi pelaku bisnis dalam lingkup hukum perdata, yaitu seperti arbitrase, konsolidasi, dan mediasi, dengan alasan antara lain:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Di samping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan biaya yang banyak.

2. Biaya perkara yang mahal.

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian sengketa semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit.

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif.

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” atau “orang kaya”. Dengan demikian, timbul kritikan yang menyatakan “hukum menindas orang miskin, tetapi orang berduit mengatur hukum”.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman para pihak.

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis.

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan di luar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.²⁶

²⁶ Ahmadi Miru, *op. cit.*, h.112-113

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa-menyewa berdasarkan hasil penelitian pada CV. Adenis Rent Car antara lain sebagai berikut:

a. Pihak yang menyewakan mempunyai hak :

1. Menerima fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa;
2. Menerima jaminan dari penyewa
3. Menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Dengan kewajiban antara lain:

1. Menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa
2. Memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

b. Pihak penyewa mempunyai hak :

1. Menerima mobil yang disewakan;
2. Menerima Jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang telah diperbuat.

Dengan kewajiban antara lain :

1. Memberikan fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa;
 2. Memberikan jaminan kepada pemberi sewa;
 3. Menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian;
 4. Membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.
2. Pertanggungjawaban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car didasarkan atas perjanjian timbal balik, yaitu resiko ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car dilakukan secara kekeluargaan .

B. SARAN

1. Untuk pemilik CV. Adenis Rent Cart agar lebih selektif dalam melihat dan memberikan Mobil sewaan kepada penyewa serta memberikan Syarat – Syarat yang memang rasional, sehingga Mobil yang disewa tidak disalahgunakan ataupun dilarikan Oleh Penyewa.
2. Untuk Penyewa, agar dapat melihat dan memahami apa yang menjadi Syarat-Syarat serta resiko – resiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi segala bentuk dan isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- A Qirom Syamsudin Meliala, S.H., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.
- Abd Thalib dan Admiral, 2005, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, Pekanbaru: UIR Press.
- _____, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru: UIR Press.
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang sunggono, *metodologi penelitian hukum*, Jakarta, Rajawali Pres
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2000
- <http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/akibat-hukum-wanprestasi.html>
diakses tanggal 24 september 2012
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2002
- Kartini muljadi & Gunawan widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta : 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso & Tjiptono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

_____ dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suyud Margono, *ADR(Alternative Dispute Resolution and Arbitration) Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2000

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale.

_____, 1986, *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*, Jakarta: PT Intermedia.

_____, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Bale.

Yan Pramadya Puspa, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aneka ilmu.

_____, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.